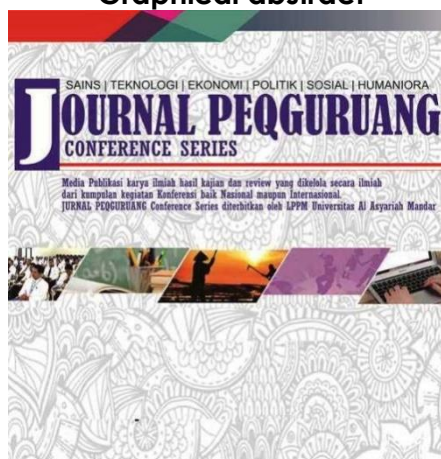


Graphical abstract



IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN MAMASA

^{1*}Muhammad Syaeba, ²Ahmad Saleh, ³Welli

Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Universitas Al Asyariah Mandar
Jl. Budi Utomo No. 2, Sulawesi Barat Indonesia

Corresponding email:

syaeban@gmail.com

ahmadmahoya@gmail.com

Wellydbrb98@gmail.com

Abstract

This research was conducted at the Regional Office of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Mamasa Regency and the region affected by natural disasters, this study aims to determine and analyze the implementation of the tasks and functions of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Mamasa Regency in disaster management and supporting factors and inhibiting the implementation of the tasks and functions of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Mamasa Regency in disaster management. This research method is a descriptive study, using a qualitative approach, this type of descriptive research is carried out on one variable under study by trying to describe in detail in accordance with the desired research problem. This research is used in order to be able to provide characterization and characteristics of a particular population or phenomenon. Data collection is done by interviews, and documentation. Data analysis in this study uses three components consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the tasks and functions of the Regional Disaster Management Agency in Mamasa Regency were still not optimal and were not felt by the community while the supporting factors were support from the government apparatus and the agencies / organizations that contributed to the disaster management while the inhibiting factors for the Mamasa Regency is the lack of Human Resources (HR) and inadequate facilities and infrastructure.

Keywords: *BPBD, Task, Function*

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamasa dan Wilayah yang terkena dampak bencana alam, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamasa dalam penanggulangan bencana serta faktor – faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamasa dalam penanggulangan bencana. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan melakukan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif ini dilakukan terhadap satu variabel yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara detail yang sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Penelitian ini digunakan agar dapat memberikan mmengenai perwatakan dan ciri khas suatu populasi atau fenomena tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Mamasa masih belum optimal dan kurang dirasakan oleh masyarakat sedangkan faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari aparat pemerintah dan intansi/ organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana sedangkan faktor penghambat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamasa adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Kata Kunci : *BPBD, Tugas, Fungsi*

Article history

DOI: <https://dx.doi.org/10.35329/jp.v3i2.1609>

Received : 21 Juli 2021 | Received in revised form : 19 Agustus 2021 | Accepted : 17 Oktober 2021

1. PENDAHULUAN

Posisi sebagai negara yang rawan dengan bencana alam maka pemerintah Indonesia membentuk Badan Penanggulangan Bencana atau disingkat BNPB sesuai dengan peraturan presiden nomor 28 tahun 2008, pembentukan ini bertujuan untuk menangani setiap bencana yang ada dibawah naungan pemerintah. Lembaga ini merupakan lembaga non departemen setingkat dengan menteri tercantum dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 pasal 10 ayat 2.

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 pasal 12 butir "h" berbunyi yaitu peraturan dari pimpinan badan nasional penanggulangan bencana untuk pedoman pemerintah daerah dalam membentuk badan penanggulangan bencana daerah. Dengan berpatokan pada undang undang diatas maka pemerintah kabupaten Mamasa membuat peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 yaitu tentang instansi pemerintah dan sistem kerja untuk badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Mamasa.

Setelah dibentuknya BPBD di kabupaten Mamasa dua tahun setelahnya kabupaten Mamasa dilanda banjir bandang pada tahun 2012 akhir . peyebab dari terjadinya banjir bandang ini yaitu banyaknya pengerokan sungai untuk menambang pasir sungai akibatnya banyak bagian ungai yang mengalami pendangkalan dan ada juga yang tidak sehingga jalur air sungai tidak rata dan terjadinya abrasi. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dari pemerintah pada pihak-pihak yang melakukan penambangan. Awalnya sudah ada kewaspadaan untuk melakukan pengeerukan pada sungai untuk membuat saluran air dapat berjalan dengan baik dari sungai induk mamasa ke laut namun tidak terealisasi dan akhirnya terjadilah banjir bandang.

Selain itu pada akhir tahun, tepatnya pada bulan November tahun 2018 bencana alam kemabli terjadi di Kabupaten Mamasa yaitu bencana Gempa Bumi. Wilayah Mamasa, Sulawesi Barat diguncang gempa tektonik yang beruntun. Hingga sampai akhir tahun 2018, aktivitas gempa masih terjadi. Delapan rumah warga di Dusun Sareppe dan Lalangpeu, Desa Aralle Timur, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, hancur tertimbun longsor ribuan kubik saat diguncang gempa. Puluhan kepala keluarga yang selamat dari bencana longsor kini diungsikan ke rumah-rumah penduduk yang aman. Akses jalan dan sarana komunikasi yang tidak memadai membuat laporan bencana alam ini baru sampai ke kabupaten beberapa hari kemudian. Bencana longsor di Dusun Sareppe dan Lalangpeu, Desa Aralle Timur, ini terjadi sekitar pukul 2.30 Wita, beberapa saat setelah

gempa guncang Mamasa. Sebanyak 8 rumah warga hancur tertimbun longsor. Selain itu, dua rumah warga lainnya dan sebuah rumah ibadah juga mengalami rusak berat. Material longsor yang terdiri dari bebatuan dan batang pohon besar menyulitkan proses evakuasi secara manual.

Pada awal tahun 2019, tepatnya pada bulan Maret 2019, Banjir bandang dan longsor menerjang Desa Batanguru, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Kamis petang. Enam rumah warga di sepanjang bantaran Sungai Batanguru ambruk dihantam banjir dan tanah longsor. Sementara sejumlah jalan antar-kecamatan dan desa putus total akibat tertimbun material longsor dan pohon tumbang. Dalam video amatir yang direkam warga, sejumlah rumah penduduk tampak ambruk diterjang banjir. Sementara, beberapa rumah warga lainnya roboh tertimbun tanah longsor. Banjir ini dipicu akibat Sungai Batanguru yang membelah Kecamatan sumarorong di wilayah tersebut meluap hingga merendam pemukiman di sepanjang muara sungai. Jalan-jalan kecamatan mendadak jadi sungai yang dialiri banjir bandang dari Sungai Batanguru yang tengah mencari jalan.

Kabupaten mamasa merupakan kawasan daerah yang sangat strategis namun karena adanya bencana yang terjadi yang menagalami banyak kerugian di banyak pihak, sehingga warga yang menempati pedesaan sekarang bertempat tinggal dipegunungan. Adapun komentar dari warga yang tentang adanya banjir karena banyak nya penebangan liar bagi pohon sehingga sedikit kawasan yang menyerap air dan tidak adanya pengimbangan untuk pembuatan saluran sanitasi di bagian persawahan. Total kerugian untuk warga yang ada di sumarorong yang usah peternakannya terluap oleh banjir sekitar kurang lebih 12.000 ekor unggas mati padi dengan umur dua minggu sudah terendam selama empat hari tambak yang juga terkena banjir akan mengalami kerugian dan pastinya gagal panen, sungai yang meluap tersebut merupakan anak dari sungai induk kabupaten mamasa.

Faktor yang lain yaitu global warming atau kondisi yang cuacanya tidak dapat diprediksi. faktor ini juga salah satu efek pemanasan global, curah hujan yang tinggi juga salah satu akibatnya. Banjir yang terjadi di kabupaten Mamasa ini merupakan bentuk keputusan yang harus dikaji ulang utamanya dalam bidang lingkungan hidup dan kumdian dijadikan pembelajaran kedepan agar supaya dengan kejadian yang tak hanya di perkotaan tapi pedesaan yang sepertinya menjadi langganan banjir untuk memebuat suatu kebijakan untuk memanilisir musibah yang akan kembali jika tidak di cegah.

Teguran ini akan menjadi lebih bermakna apabila kita bisa menerimanya

dengan sepenuh hati dan lebih bijaksana dalam melakukan menjaga dan mempergunakan sumber daya alam. Seperti yang dikatakan bahwa hal ini akan menjadi pedoman kita sebagai manusia untuk melihat kedepan dalam pengkajaian lingkungan hidup yang strategis.

Sudah saatnya BPBD untuk melakukan tindakan meminimalisir dampak terjadinya musibah ini lagi. Mungkin bisa dikatakan jika melihat penjabaran musibah yang ada diatas sebelumnya kabupaten mamasa mengalami musibah dari tahun ke tahun yang berarti gambaran ini adalah acuan untuk menetapkan langkah dan tindakan kita. Namun yang membuat masyarakat terkejut dalam melihat semua musibah di sepanjang tahun 2019 yaitu gempa bumi yang bukan sebagai langganan gempa dan banjir namun mengapa semua terjadi di hampir seluruh wilayah kabupaten Mamasa.

BPBD kabupate/kota yang telah tanggap dalam bencana karena sudah bisa membaca situasi dengan mendirikan posko dan bisa menakodai semua instansi yang turut dalam penanggulangan bencana seperti halnya palang merah indonesia, search and rescue, tentara nasional indonesia, polisi republik indonesia, serta pramuka dan instansi yang lain, dengan melakuak koordinasi yang baik maka penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dengan melihat pada kejadian gempa bumi dan banjir bandang pada saat itu maka dapat disimpulkan bahwa masih sangat kurangnya koordinasi dalam penanganan penanggulangan bencana. Dengan melihat sumber daya yang ada dilapangan untuk datang sebagai relawan dalam membantu BPBD dalam melakukan evakuasi namun sayangnya tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak berjalan dengan baik, BPBD melakukan assesment ke masyarakat TNI, POLRI, dan PMI juga ikut serta melakukan hal yang sama, sedangkan lembaga kemahasiswaan yang hadir tidak tau untuk berbuat apa-apa hingga akhirnya pulang kerumah masing-masing. Walaupun semuanya memerlukan data korban dan kerusakan dalam bencana tersebut namun tidak akan terjadi jika tidak ada koordinasi dengan baik, hal ini bisa saja mendapatkan data real meski yang menanganinya hanya satu dan lainnya melakukan hal urgent. Koordinasi yang baik akan mepercepat dalam mengevakuasi korban sesuai dengan slogannya bertidnka dengan cepat dan akurat.

Pengamatan selama ini kepada BPBD kabupaten mamasa sangat kurang tanggap utamanya dalam melakukan koordinasi dengan instansi yang lain. Kejadian yang biasanya terjadi dilapangan justru membuat instansi lain menunggu karena kurangnya koordinasi yang seharusnya BPBD melakukan hibauan dan koordinasi pada semua instansi yang terlibat.

Bebicara tentang penanganan bencana sangat dibutuhkan kecakapan dalam mengambil tindakan kesiagaan dan kecepatan untuk seluruh aparat dan instansi yang ada di lokasi tersebut, sehingga jika bencana lagi maka bisa untuk laangsung bertindak tanpa adanya lagi urusan administrasi dan himbauan lagi. Hal terpenting yang seharusnya tumbuh dalam jiwa instansi BPBD sebagai pelaksana dalam melakukan tindakan kebeencanaan untuk melakukan koordinasi kepada warga sebelum terjadinya bencana, bukan sekedar untuk melakukan evakuasi ketika bencana sudah datang, dan itu sangat perlu untuk dibenahi dan di berdayakan ulang.

Sesuai tugas dan fungsinya BPBD di kabupaten Mamasa sudah dapat dibuktikan dengan melihat beberapa bencana yang sudah terjadi sebelumnya antara lain, banjir tahun 2012, gempa bumi tahun 2018, dan bencana banjir di tahun 2019, dimana saat dilapangan seharusnya malakukan manjeman teknis dalam penanggulangan bencana atau evakuasi namun sebaliknya terjadi tidak sesuai dengan fungsinya, bahkan di lapangan semua instansi yang terlibat mengambil tindakan sesuai dengan kebijakan mereka yang dibuat sendiri dan tidak ada yang mengarahkannya, hal ini yang kemudian dijadikan dasar dalam menialai BPBD di kabupaten Mamasa, dan sangat nampak bahwa kurangnya koordinasi dalam proses penanganan evakuasi tersebut.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan menulis dengan judul "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamasa".

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamasa?
- 2) Faktor – faktor apa yang mempengaruhi implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamas

b. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamasa dalam penanggulangan bencana.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Mamasa dalam penanggulangan bencana.

c. Manfaat Penelitian

- 1) Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya di Kabupaten Mamasa dalam implementasi tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana.
- 2) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi pembaca dan peneliti lain yang mempunyai minat yang sama yaitu untuk mengkaji masalah – masalah yang berhubungan dengan implementasi tugas dan fungsi dari sebuah lembaga / organisasi.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan penyusunan dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif, dalam melaksanakan penelitian deskriptif ini dengan cara meneliti hanya pada satu objek atau variabel dan datanya akan dikumpulkan dan dideskripsikan serinci mungkin disesuaikan dengan pokok masalah yang diinginkan penulis. Kegunaan dari penelitian ini yaitu mampu menyajikan ciri khas dan watak tentang peristiwa pada objek yang diteliti.

Dalam pengumpulan datanya metode deskriptif tersebut, dimana penulis atau peneliti melakukan survei langsung dilapangan,

- a. Data dapat ambil dari kumpulan orang yang dapat dipercaya untuk memberikan informasi
- b. Data yang menjadi informasi yang didapatkan dari kelompok orang tersebut dikategorikan sebagai data sample.
- c. Data dikumpulkan dari hasil interview dengan menyiapkan naskah pertanyaan untuk ditanyakan kepada informan.

Kualitatif adalah metode penelitian yang sering digunakan untuk penelitian berbasis sosial masyarakat, sejarah, fungsional organisasi, serta hubungan kekeluargaan. Metode ini pastinya berbeda dengan kuantitatif (Ruslan, 2003)

Metode penelitian kualitatif sifatnya umum yaitu tentang kenyataan sosial dan perspektif partisipan. Pemahaman diperoleh ketika turun langsung lapangan untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian dan kemudian ditarik beberapa kesimpulan tentang kenyataan yang ada di lokasi penelitian.

Penggambaran fenomena-fenomena yang dibahasakan dengan lebih sistematis dapat dijelaskan melalui metode deskriptif kualitatif. Fenomena yang ada dapat berupa bentuk, karakteristik, aktivitas, hubungan, perubahan, dan perbedaan fenomena antara yang satu dengan yang lain.

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamasa.

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang dianggap paham mengenai kasus ini secara mendalam.

Penulis menyediakan informan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kepala BPBD Kabupaten Mamasa
- b. Staf BPBD Kabupaten Mamasa (Koor. bidang kedaruratan dan logistik).
- c. Organisasi lain yang terkait dengan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Mamasa
- d. Masyarakat yang terkena dampak bencana alam banjir dan gempa bumi di Kabupaten Mamasa.

Panduan wawancara merupakan instrumen yang digunakan oleh penulis sebagai alat untuk pengumpulan data. Teknik wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan penting untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan mengkaji dan menggali data yang diketahui oleh narasumber sesuai dengan informan yang telah dipilih oleh penulis yang dilakukan dengan metode purposive.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

Untuk menganalisis data penulis membutuhkan kemampuan untuk mengelolah data mentah agar tersusun menjadi data yang akurat. Sehingga peneliti bisa menjawab permasalahan yang diajukan sebagai hasil di penelitian, dalam penelitian ini mangacu pada model analisis interaktif. Dalam proses analisis interaktif ada tiga komponen utama yang selalu berkaitan dan terlibat dalam proses analisis. Secara berkelanjutan proses interaktif penulis memerlukan disiplin yang tinggi dalam menerapkan tiga komponen tersebut agar tidak mengalami kemudahan dalam proses merumuskan kesimpulan dari hasil penelitiaannya. Adapun tiga komponen utama tersebut antara lain reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan serta verifikasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya Badan Penanggulangan bencana daerah di kabupaten Mamasa, kiranya dapat memberikan solusi tentang kebencanaan untuk masyarakat kabupaten Mamasa. Setidaknya dapat mengetahui status atau peringatan dini bencana yang akan terjadi, terkhusus untuk bencana alam seperti banjir agar diketahui lebih awal dan bisa membuat pencegahan guna meminimalisir kerusakan jika terjadi. Namun kehadiran lembaga ini tidak sesuai dengan realitanya, dimana masyarakat di kabupaten Mamasa tidak

mengalami dampak yang dilakukan kehadiran BPBD. Sesuai dengan penjelasan dari seorang informan saat wawancara dilakukan, yakni dengan Bapak Saprianus beliau mengatakan bahwa:

“Adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamasa tidak kami rasakan keberadaannya sama sekali, walaupun saat itu rumah kami sekeluarga terkena dampak banjir. Tetapi malah yang membantu kami dalam melakukan adalah masyarakat yang ada di sekitar desa kami. Banjir yang seperti itu tidak pernah kami duga, adapun jika memang BPBD itu ada tentunya akan memberikan informasi tentang peringatan dini kepada kami masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Sumarorong agar dapat meminimalisir kerugian akibat bencana dengan cepat.” (Wawancara, 14 Maret 2020).

Sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh informan yang mengemukakan bahwa kehadiran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak dirasakan oleh masyarakat sumarorong pada umumnya, dilihat pada kejadian bencana dalam mengawali tahun 2019 dimana BPBD tidak memperhatikan masyarakat yang terkena banjir.

Sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya pembentukan BPBD di kabupaten Mamasa. Namun berbeda dari apa yang di ungkapkan oleh pihak BPBD yang menyatakan bahwa mereka sudah membuat posko penanggulangan bencana di setiap kecamatan di Kabupaten Mamasa. Posko yang terbentuk tersebut ada di setiap kecamatan sebanyak tujuh belas posko dan pengurusnya sendiri yaitu pimpinan kecamatan dalam hal ini adalah camat.

BPBD Kabupaten Mamasa sudah megupayakan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat guna demi melakukan pertolongan dalam waktu yang cepat. Yang aneh adalah terbentuknya posko kebencanaan belum diketahui sepenuhnya masyarakat sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh informan melalui wawancara. Namun ada juga informan yang mengakui keberadaan poskonya sebanyak dua informan. pendapat dari masyarakat tersebut tidak bisa disalahkan karena pada umumnya masyarakat membicarakan sesuatu berdasarkan penglihatan mereka di lapangan utamanya soal pihak pemerintah.

Salah satu informan menjelaskan bahwa mereka tidak terlaui mengharapkan adanya bantuan yang berupa sembako dari pemerintah, namun yang mereka harapkan itu saat terjadinya bencana ada perhatian khusus dari

Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Bantuan dalam bentuk perhatian oleh pemerintah atau BPBD itu dianggap sudah lebih dari cukup. Mereka sangat mengharapkan bentuk perhatian pemerintah yang lebih pada masyarakatnya. Namun apa yang mereka harapkan itu tidak sesuai,

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan dimana bahwa, masyarakat tidak hanya membutuhkan sembako melainkan dukungan psikologis dan dorongan semangat dalam menghadapi bencana yang dialami. Dalam hal ini untuk memperhatikan masyarakat tentunya tidak membutuhkan anggaran dana yang banyak tetapi lebih kepada melakukan pertolongan cepat dan dengan segera. Dan pihak BPBD juga harus menyediakan beragam solusi dalam mengevakuasi korban, karena jika penanggulangan terhalang oleh anggaran maka alternatif solusi lain dapat digunakan yang lebih hemat anggaran sampai pada pencairan dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten. Jika tidak demikian maka akan menghalangi dalam mengevakuasi dan penanganan bencana sehingga terjadi kerusakan yang lebih besar.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Koord. Bidang Kedaruratan dan Logistik bapak Ian Lebok, dimana beliau mengatakan bahwa :

“Kami dari BPBD Kabupaten Mamasa turun kelokasi bencana tidak mungkin tanpa menggunakan dana jadi kami akan turun apabila dana sudah cair karena relawan yang kami turunkan paling tidak membutuhkan anggaran untuk makan, minum dan keperluan yang lainnya.” (Wawancara, 13 Maret 2020)

Perkataan dari koordinator bidang kedaruratan dan logistik yakni bapak Ian Lebok sudah sesuai dengan realita di lapangan, dimana dalam melakukan evakuasi penanggulangan bencana pastinya membutuhkan pendanaan untuk konsumsi serta biaya transportasi. Namun jika berbicara tentang pendanaan tentunya suatu lembaga pasti sudah disiapkan secara khusus utamanya yang merujuk pada pertolongan kebencanaan. Oleh karena itu pendanaan tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak turun lapangan dalam mengevakuasi korban bencana. Karena pelaksanaan penanggulangan bencana tidak selamanya menggunakan anggaran, ada beberapa kegiatan penanggulangan bencana yang tidak harus menggunakan biaya yang banyak dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sambil menunggu dana cair dari pemerintah kabupaten.

a. Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Mamasa

Dalam Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamasa, terdapat beberapa tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Mamasa. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil dua tugas dan satu dari fungsi BPBD Kabupaten Mamasa yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1) Menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.

Di awal tahun 2019 dimana dalam menanggulangi bencana banjir yang menggunakan alat perlengkapan yang tidak safety dan kurang dalam melaksanakan evakuasi korban bencana. Banjir yang terjadi di desa Batanguru kecamatan Sumarorong tersebut yang diisolasi dalam beberapa hari. Pendistribusian bantuan berupa logistik ke lokasi bencana masih terkendala oleh alat transportasi dan jalanan yang rusak parah sehingga bantuan yang masuk tersebut hanya pada daerah yang dapat dijangkau kendaraan. Dan akan dikirim dalam jangka waktu sehari-hari untuk melakukan pendistribusian bantuan tersebut. Pada evakuasi tersebut relawan juga dibatasi oleh alat transportasi yang membuat penanggulangan menjadi tidak sesuai prinsipnya yakni tindakan cepat bagi area yang mengalami bencana paling parah, namun dengan kendaraan yang dimilikinya membuat realawan hanya menjangkau daerah yang bisa diakses oleh kendaraan yakni kondisi bencana yang mudah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Labora Tandipuang bahwa :

“Pada saat itu kami belum punya alat transportasi yang memadai sehingga penyaluran logistik di Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong tidak dapat kami distribusikan dengan cepat, namun kami tetap berusaha supaya logistik dapat dengan cepat dapat didistribusikan”. (Wawancara 15 Maret 2020)

BPBD yaitu lembaga yang mempunyai peran penting dalam menanggulangi bencana dan wajib mempunyai persiapan fisik mental dan kesiapan lain sebelum turun lapangan, adapun salah satunya adalah mempersiapkan alat untuk menanggulangi bencana dengan standarisasinya berdasarkan dari peraturan BNPB nomor 17 tahun 2009 yang membahas tentang pedoman dalam menanggulangi bencana. Adapun standar peralatan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan BNPB No. 17 tahun 2009 yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Peralatan Penanggulangan Bencana Berdasarkan peraturan BNPB No. 17 tahun 2009

No	Nama Alat	No	Nama Alat
1	Tenda Komando	15	Mobil Dapur Umum Lapangan
2	Tenda Pleton	16	Mobil BBM
3	Tenda Regu	17	Mobil Tangki Air
4	Tenda Keluarga	18	Water Pillow
5	Tenda Posko Kesehatan	19	Instalasi Penjernih Air
6	Mobil Komando	20	Vetbet
7	Mobil Ambulance	21	Dapur Umum
8	Mobil Rescue	22	Alat Komunikasi
9	Mobil Operasional	23	Genset + Lapu Sorot
10	Mobil Truk	24	Tukang Kayu
11	Truk Trailer	25	Tukang Batu
12	Motor Trail	26	Tukang Eletronik
13	Mobile Water Treatment	27	Vertical Rescue
14	Toilet Mobile	28	Mega Phone

Selain itu Adapun peralatan minimal harus tersedia jika terjadi banjir yang wajib dimiliki oleh penanggulangan bencana yaitu dapat dilihat pada tabel berikut

Peralatan Penanggulangan Bencana Banjir

No	Nama Alat
1	Perahu Karet
2	Perahu Karet Bermesin
3	Pelampung
4	Mesin Pompa Air
5	Mesin Penyedot Air
6	Mesin Fogging
7	Chainsaw
8	Vertical Rescue
9	Hand Sprayer
10	Dump Truck
11	Back Hige

Dari peralatan yang di paparkan sebelumnya sesuai dengan peraturan BNPB nomor 17 tahun 2009 yang dimiliki oleh BPBD kabupaten Mamasa dan standarisasinya dalam penggunaan alat untuk menanggulangi bencana jika keadaan banjir. Dengan demikian penulis membuat kesimpulan bahwa peralatan yang dimiliki oleh BPBD di kabupaten Mamasa masih kurang untuk digunakan dalam menanggulangi bencana dan standarisasinya juga masih minim.

Dengan adanya peralatan yang mendukung akan berpengaruh terhadap kinerja BPBD kabupaten Mamasa dalam menjalankan

tugas serta fungsinya jika dilihat dari perlengkapan alat dan standarisasi yang dimilikinya. Sedangkan kewajiban suatu lembaga untuk melengkapi peralatan dan disesuaikan dengan standarisasinya, jika tidak maka tidak memungkinkan untuk melakukan tugas serta fungsinya.

2) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana

Dalam pembuatan peta rawan bencana, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat peta rawan bencana tersebut diantaranya yaitu :

Sebelum terjadinya bencana atau dalam penanggulangan bencana peta tersebut harus sudah siap, dicontohkan pada kasus bencana banjir yang terjadi awal tahun di kecamatan sumarorong, seharusnya peta rawan bencana sudah siap dimana saat akan mengalami musim hujan maka daerah di kecamatan sumarorong yang rawan akan bencana banjir sudah dapat mengetahui hal-hal yang akan terjadi dan setidaknya dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi. Dan kasus lain yang terjadi di kecamatan Nosu dengan perkiraan yang tidak mungkin untuk mengalami banjir karena letak geografisnya yang berada di pegunungan namun tidak sesuai dengan realitanya bencana banjir paling parah ada di kecamatan tersebut.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Ian Lebok sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik beliau mengatakan bahwa :

“Bencana banjir yang terjadi diawal 2019 benar-benar diluar dugaan. Pada waktu itu kami dari BPBD bekerja sama dengan BMG menganalisis sesuatu yang akan mungkin terjadi dimana waktu itu hujan secara terus-menerus. Tetapi diakui memang kekurangan kami yaitu kami tidak sempat menginformasikan secara langsung kepada masyarakat tentang peringatan dini yang kemungkinan akan terjadi. Kami cuma menginformasikannya kepada masing-masing pegawai yang ada dikecamatan dengan harapan mereka yang ada di kecamatan dapat menyampaikan informasi tersebut akan tetapi seperti ini informasi tersebut tidak tersampaikan ke masyarakat”. (Wawancara, 16 Maret 2020)

DAS memiliki karakteristik yang disebabkan oleh kondisi DAS tersebut, Karakteristik sangat di pengaruhi oleh pola letaknya daerah itu sendiri seperti daerah yang curah hujan tinggi maka akan rawan terjadinya bencana longsor begitu juga dengan bencana banjir, misalnya pada daerah yang ketinggiannya diatas dari genangan air banjir yang biasanya mudah untuk keluar karena berada diatas ketinggian dan daya berat dari

air tersebut yang mudah untuk keluar mencari jalur air, hal ini biasanya terjadi pada wilayah di daerah hulu, sedangkan pada wilayah yang ada di daerah hilir yang memiliki kawasan rendah dan kemiringan pada sungai dan tanah bisa dikatakan datar dan ketika terjadi banjir akan sulit untuk surut hingga waktu yang lama. Kondisi ini akan lebih sulit lagi apabila terjadi secara bersamaan dengan pasang surut dari air laut yang tentunya tidak mungkin untuk dilakukan dengan cara memompa untuk mengataskan air dalam jumlah besar. Dan dalam kondisi seperti ini utamanya di daerah hilir harusnya ditangani dengan melakukan integrasi antara air sungai yang merupakan penyebab banjir dengan gerak pasang surut air laut (Luknanto, 2002).

Dengan demikian perancangan peta rawan bencana memang diwajibkan terkhusus dalam penanganan masalah banjir, hal ini akan meminimalisir terjadinya kerusakan dan memakan korban karena penanganannya bisa dilakukan secara cepat.

Di BPBD kabupaten Mamasa sudah membuat peta rawan bencana, tapi penyebarannya belum dilakukan ke seluruh kecamatan yang ada, dan seharusnya setiap kecamatan sudah memiliki minimal satu peta. BPBD beralasan karena peta yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya makanya tidak disebar ke daerah kecamatan. Sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamasa Bapak Ferdinandus Beliau menyampaikan :

“Peta rawan bencana di Kabupaten Mamasa itu sudah ada tetapi kami dari BPBD belum menginformasikannya kepada masyarakat umum karena menurut kami peta rawan bencana tersebut belum terlalu valid. Kami berencana mengundang atau bekerjasama terlebih dahulu dengan ahli pemetaan untuk memperbaiki peta rawan bencana tersebut”. (Wawancara, 17 Maret 2020)

Dari penjelasan diatas yang mengemukakan tentang peta yang belum valid, tetapi beliau tidak menjelaskan alasan yang lebih detail kenapa peta rawan bencana tersebut masih tidak valid dan dampak apa yang muncul ketika dilakukan penyebaran kepada masyarakat. Namun terlebih dahulu BPBD akan melakukan kerjasama dengan para ahli pemetaan untuk mendapatkan hasil pemetaan yang lebih baik. Dengan adanya peta rawan bencana yang telah dibuat, maka hal itu harusnya dianalisis terlebih dahulu oleh lembaga yang bekerja terkait kebencanaan, sesuai dengan harapan yang dikemukakan oleh informan yakni Bapak Dominggus beliau mengungkapkan bahwa :

“BPBD Kabupaten Mamasa kedepannya harus lebih tanggap dan sigap lagi, setidaknya mereka dapat menyampaikan kepada kami tentang informasi sebelum bencana terjadi atau peringatan dini. Seperti salah satu contohnya yaitu penyuluhan atau penyampaian tentang bencana-bencana apa saja yang kemungkinan terjadi di wilayah tempat tinggal kami atau adanya penjelasan tentang peta rawan bencana”. (Wawancara, 14 Maret 2020)

Sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh informan tersebut bahwa masyarakat sangat membutuhkan adanya peta rawan bencana. Dengan merujuk kembali kepada pendapat dari pihak BPBD tentang ketidakjelasan peta yang dibuat serta dampak apa yang disebabkan bila disebarkan, jika demikian sambil menunggu hasil dari tim pemetaan sebaiknya disebarkan dahulu sebagai patokan dalam menangani bencana yang kemungkinan akan terjadi, untuk mengurangi hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian besar pada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas yakni penyusunan, penetapan dan penginformasian pada peta rawan bencana dapat disimpulkan bahwa BPBD kabupaten Mamasa belum melakukannya dengan maksimal namun telah berjalan secara bertahap dan sementara dalam proses.

3) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Mengawali tahun 2019 dimana terjadi bencana banjir di kecamatan sumarorong, dan pihak BPBD mendirikan posko bencana di sumarorong yang dianggap dan dapat dikatakan sebagai posko yang sangat kacau.

Terbentuknya BPBD di kabupaten Mamasa dapat digolongkan sudah termasuk lembaga yang tua, yang bisa dinilai sudah mandiri untuk menangani bebannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dapat menjadi komando untuk setiap lembaga dan relawan yang terlibat dalam evakuasi kebencanaan, dan juga harus mampu untuk manajemen sebaran logistik, tugasnya, serta memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Komando dapat diartikan sebagai suatu bentuk koordinasi kepada relawan lain yang terlibat, tidak ada komando sama dengan tidak adanya koordinasi. Komando yang dilaksanakan terhadap sumber daya yang ada di lapangan untuk menanggulangi bencana.

Dari hasil wawancara memberikan kejelasan bahwa pada bencana banjir yang terjadi di awal tahun 2019 belum terlaksana koordinasi dengan baik sehingga dalam menanggulangi bencana masih tidak efektif.

Bukan akibat dari ketidakmauan untuk melaksanakan koordinasi namun dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan mereka dalam melakukan proses koordinasi.

Sedangkan suatu koordinasi dalam menanggulangi bencana mengartikan bentuk relasi antara berbagai pihak yang turut berperan dalam melakukan evakuasi terhadap korban bencana. Bentuk koordinasi ini dapat mencakup hubungan skala internasional, lokal, ataupun di lingkungan lokasi itu tergantung dari bencana yang terjadi.

Koordinasi kebencanaan difungsikan untuk tindakan dan bentuk perhatian pada bencana yang terjadi. Koordinasi yang kompak tentunya akan menghasilkan kinerja yang baik diantaranya bisa mengurangi kerusakan yang terjadi akibat bencana dan juga sebagai kunci utama dalam evakuasi kebencanaan. Dicontokan pada pelaksanaan tanggap darurat yang dikoordinasikan secara terstruktur akan menghasilkan kesuksesan dalam tanggap darurat bencana tersebut sedangkan tidak adanya koordinasi akan memberikan hasil yaitu kegagalan dan kekacauan dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana.

Bentuk koordinasi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu vertikal dan horizontal, dalam bentuk vertikal adalah pihak yang berbeda-beda tingkatannya atau levelnya untuk penanganan suatu kebencanaan. Sedangkan horizontal merupakan pihak yang tingkatannya sama dalam melakukan penanganan kebencanaan. Sesuai dengan siklus dalam kebencanaan, mengkoordinasikan bencana dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu sistem komando, konsensus atau dapat terjadi sendiri atau dengan otomatis terjadi. Dalam penanggulangan bencana, tanggap darurat dipandang perlu untuk menerapkan sistem cepat. Seperti pada koordinasi yang dilakukan dalam bentuk komando dianggap bentuk yang paling bagus. Untuk koordinasi yang dilakukan secara otomatis ketika semua jenis aktivitas atau tindakan yang menandakan respon pada bencana yang terjadi sudah mengalami pemulihan dan mulai membaik. Koordinasi otomatis tersebut dilakukan oleh pihak yang berada langsung di lokasi kejadian maupun korban yang mengalami kerugian.

Secara umum untuk penyelenggaraan koordinasi pasti banyak yang tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya atau banyak kendala dan hambatan yang muncul dalam prosesnya, hambatan yang bisa saja terjadi yaitu pengurusan administrasi tentang SOP contoh surat perizinan. Dan dalam memimpin tahap koordinasi kebencanaan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap individu.

Hambatan yang dijelaskan sebelumnya pada dasarnya tidak menghalangi dalam menanggulangi bencana namun menjadi pendukung dalam pelaksanaannya. Dengan demikian proses mengkoordinasikan wajib

untuk dilaksanakan dalam kondisi darurat bencana maupun tidak.

Pada dasarnya semua pihak baik itu BPBD, instansi pemerintah, organisasi – organisasi dan masyarakat menginginkan terbanngunnya koordinasi yang baik. Namun dalam menjalankan koordinasi tersebut BPBD mempunyai fungsi sebagai komando atau pemegang kendali bagi semua pihak yang terlibat, dan semua pihak hanya menunggu komando dari pihak BPBD yang berada di lokasi bencana.

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Tugas dan Fungsi BPBD di Kabupaten Mamasa

Implementasi dari tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Mamasa sebagai pihak yang berperan penting dalam hal kebencanaan tentunya mendapatkan pengaruh dari beberapa faktor, yang dalam hal ini ada dua faktor yang meempengaruhi yaitu faktor pendukung dan factor penghambat.

1) Faktor Pendukung

a) Dukungan dari Pemerintah Kabupaten

Dengan adanya dukungan dari pemerintah kabupaten dapat menjadi poin penting bagi badan penanggulangan bencana daerah, dukungan yang dimaksudkan disini adalah anggaran sebagai pokok utama dalam pelaksanaan proses penanggulangan bencana.

b) Banyaknya Instansi dan Organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana

Dukungan yang lain berupa bantuan dari organisasi lain dalam jumlah yang tidak sedikit sebagai relawan kebencanaan merupakan faktor pendukung yang lain bagi BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di daerah kabupaten Mamasa. Instansi yang ikut tersebut akan menjadi sumber daya manusia yang ahli dalam menangani kebencanaan nantinya. Sehingga proses penanggulangan dapat teratasi dengan cepat, sesuai dengan harapan dan tujuan dari BPBD.

Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa keberadaan organisasi – organisasi yang ikut dalam penanggulangan bencana sangat membantu BPBD dalam melaksanakan tugasnya dan sangat meeringankan pekerjaan pihak BPBD dalam menanggulangi bencana yang terjadi.

2) Faktor Penghambat

a) Sumber daya manusia yang tidak berkompeten dibidang penanggulangan bencana.

Sumber daya manusia harusnya menjadi perhatian khusus bagi pihak BPBD untuk direkrut karena SDM yang tidak handal atau ahli dan tidak punya basic dalam menanggulangi bencana akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan juga

perkembangan di masa mendatang BPBD itu sendiri.

b) sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan

sarana dan prasarana adalah sesuatu yang penting dalam melakukan pelayanan pada masyarakat utamanya untuk pelaksanaan penanggulangan bencana. Jikalau hal diatas tidak dapat dipenuhi maka pelaksanaan pada kegiatan apapun tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu penghambat lain dari proses penanggulangan bencana adalah sarana dan prasarana yang masih belum terpenuhi.

Dari hasil dari hasil penelitian diperoleh jelas bahwa BPBD kabupaten Mamasa memiliki peralatan penanggulangan bencana yang masih kurang memadai.

4. SIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Implementasi implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamasa masih kurang efektif atau belum optimal dan kurang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Mamasa. BPBD yang bekerja dalam menanggulangi bencana kurang diketahui keberadaannya oleh masyarakat di kabupaten Mamasa, pembentukan posko penanggulangan bencana yang ditempatkan disetiap kecamatan yang ada di kabupaten Mamasa tetapi sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan posko tersebut, sumber daya manusia yang tidak berkompeten atau tidak memiliki basic penanggulangan bencana padahal di kabupaten Mamasa sendiri memiliki banyak organisasi yang ahli dalam melakukan penanggulangan bencana antara lain KPA, PMI, pramuka serta organisasi yang lain. Sehubungan dengan koordinasi yang mengalami masalah pada sistem komando yang baru diterapkan ketika bencana sudah terjadi, padahal seharusnya koordinasi tersebut terjalin juga walaupun dalam kondisi yang normal dan terkait dengan peralatan dalam menanggulangi bencana yang dianggap kurang namun dukungan pemerintah kabupaten sangat besar.
- b. Faktor pendukung dan factor penghambat dalam implementasi tugas dan fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Mamasa yaitu :
 - 1) Faktor Pendukung yaitu adanya dukungan dari pemerintah dan instansi serta organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana yang selalu memberikan dukungan dengan maksimal, baik itu dukungan saat terjadinya bencana maupun dukungan pada saat pasca bencana.

- 2) Faktor penghambat yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamasa dimana mereka tidak mempunyai basic dalam penanggulangan bencana, SDM yang tidak tepat dapat menjadi factor penghambat dalam perkembangan BPBD sendiri. Selain itu factor penghambat yang lain juga adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya menanggulangi bencana.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka adapun saran yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam melakukan kegiatan perekrutan anggota BPBD agar mengambil calon anggota yang latar belakangnya dari organisasi yang bergerak di bidang kebencanaan, ataupun memilih anggotan yang setidaknya memiliki sedikit kemampuan atau basic tentang kebencanaan.
- 2) Peralatan HT wajib dimiliki oleh organisasi yang melakukan kordinasi kepada BPBD untuk menunjang koordinasi yang baik dalam bentuk komunikasinya di lapangan ataupun dimana saja.
- 3) BPBD sebaiknya lebih memperbanyak koordinasi dengan isntansi atau organisasi-organisasi yang sering melakukan kegiatan penanggulangan bencana supaya dapat belajar dan berbagi pengalaman bagaimana penanggulangan bencana dengan baik.
- 4) Untuk menyalurkan bantuan pihak BPBD wajib untuk melakukan penyaluran langsung ditengah masyarakat guna untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi korban yang terkena bencana, selain itu juga dapat mengetahui bantuan yang tersalur sudah sampai pada korban.

Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

PERPRES Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peraturan BNPB No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana

PERDA Kabupaten Mamasa No. 2 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BPBD Pemerintah Kota Medan. 2013. Tugas dan Fungsi BPBD (online) [Http://bpbdd.pemkomedan.go.id/statis-7-tugas-dan-fungsi.html](http://bpbdd.pemkomedan.go.id/statis-7-tugas-dan-fungsi.html) diakses 7 20 Januari 2020

DR.Maarif, Syamsul, M.Si. 2010. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana di Indonesia (online). <http://www.Bnpb.go.id> diakses 19 Januari 2020

DR.Maarif, Syamsul, M.Si. 2012. Pikiran dan Gagasan Penanggulangan Bencana 2010 - 2014 (online). <http://www.Bnpb.go.id> diakses 19 Januari 2020

Dr. Santoso, Imam. M. 2008. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Online) https://www.gitews.org/tsunamikit/%20en/E6/further_resources/national_level/peraturan_presiden/perpres%2008.2008%20BNPB.%20Pdf diakses 20 Januari 2020

Indra, Purnama Aria ST, MUM dkk. 2011. Posisi Indonesia dan Kerentanan terhadap Bencana (online) www.bulletin.penataanruang.net/index-asp?mod=fullart&idart=329 diakses 20 Januari 2020

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto,S., 2010, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek", Jakarta, Rineka Cipta.
- Pearce II, John A. & Robinson Jr. Richard B., 2014, "Manajemen Strategis: Strategic Management-Formulasi, Implementasi dan Pengendalian Edisi 12", Jakarta, Salemba Empat.
- PMI. 2008. Bertindak Cepat - Tepat Kenali dan Kurangi Risiko Bencana. Jakarta : Palang Merah Indonesia.
- Sugiyono, 2012, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", Bandung, Alfabeta.
- S. Sorooshian, Z. Norzima, I. Yusof & Y. Rosnah, 2010, Effect Analysis on Strategy Implementation Drivers, World Applied Sciences Journal Vol.XI No.X, 1255-1261